



**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 bagi para pengelola di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum kegiatan Pembangunan Bidang Sosial sebagai tahapan kegiatan dalam kerangka mewujudkan Visi Dinas Sosial yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”***.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Mojokerto, 2 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO



TRY RAHARJO MURDIANTO, S.STP., M.AP.
Pembina
NIP. 19870519 200602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Dasar Penyusunan.....	2
1.3.Maksud dan Tujuan.....	8
1.4.Dasar Pertimbangan Perubahan.....	9
1.5. Sistematika.....	9
BAB II. EVALUASIPELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021	10
2.1 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	37
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	43
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir PD.....	44
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	57
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	59
BAB IV. PENUTUP	70
Lampiran- lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2022 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan diatas secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) untuk periode tahun 2022 untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 berfokus pada Prioritas Agenda Pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022, sebagaimana terdokumentasi dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, yaitu : ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”***.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 juga mengacu kepada Rencana Kerja Kementerian Sosial Tahun 2022 dengan Optimalisasi Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap masyarakat rentan dalam dampak pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Merupakan visi, misi, dan program prioritas (platform) serta arah kebijakan Gubernur

Jawa Timur yang bertumpu pada Visi Gubernur Jawa Timur tahun 2019-2024 yaitu **“Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”**.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 serta untuk mendukung perwujudan Misi Dinas Sosial, yaitu :

2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan.

Dan menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran, yang akan menjadi dasar penyusunan RKA PD dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan penyusunan RAPBD.

Sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan PD, rencana kerja juga mengalami perubahan untuk menyesuaikan kondisi dan situasi. Artinya rencana kerja bisa mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai PD. Perubahan Rencana Kerja ini memfokuskan pada perubahan pada bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2022. Perubahan Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran pagu indikatif yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan.

1.2. Dasar Penyusunan

Sedangkan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Mojokerto juncto Undang-

- Undang Nomor 18 Tahun 1950 peraturan Tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal pembentukan Kabupaten Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
26. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
27. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

- 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/3708 tahun 2020 Tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
38. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38 Tahun 2009/E1);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026;
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Srtategik (RENSTRA) Kabupaten Mojokerto;
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Nomor 26 Tahun 2022 tentang PRKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan yang bersifat tahunan yang telah disusun pada Tahun 2022.

- a. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun program, kegiatan dan sub. kegiatan periode Triwulan IV pada tahun berjalan;
- b. Memberikan acuan bagi PD dalam menentukan lokasi kegiatan periode Triwulan IV pada tahun berjalan;
- c. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode Triwulan IV pada tahun berjalan;
- d. Memberikan acuan bagi PD dalam kelompok sasaran kegiatan periode Triwulan IV pada tahun berjalan.
- e.

1.3.2 Tujuan

Perubahan Rencana Kerja ini bertujuan untuk :

- 1) Mengantisipasi perubahan keadaan yang terjadi pada tahun berjalan
- 2) Menjadi acuan bagi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.5. Sistematika

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022.

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RECANA KERJA
S/D TRIWULAN IV TAHUN 2022
(Per/Bulan Desember 2022)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RenjaPerangkat Daerah Triwulan III dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan Tahun 2022, yang terdiri dari 5 program 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan hasil realisasi keuangan sebesar 91,90%. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pemberdayaan Sosial;
- c. Program Rehabilitasi Sosial.
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Program Penanganan Bencana;

Capaian Renstra Dinas Sosialpada Tahun 2022 pada umumnya tercapai, adapun capaian program dan kegiatan Tahun 2022sampai dengan Triwulan IV sebagai berikut :

1.) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai terealisasi 85,89%.

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target terealisasi 97,84%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu, terealisasi 97,01%.

- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Jumlah dokumen laporan terealisasi 98,67%.

Kegiatan :

- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah terealisasi 83,00%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN terealisasi 83,00%.

Kegiatan :

- c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan terealisasi 93,11%

Sub. Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, terealisasi 88,22%.

- 2) Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Jumlah tenaga kerja pembantu administrasi keuangan selama 12 bulan, terealisasi 96,30%.

Kegiatan :

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan terealisasi 95,76%.

Sub. Kegiatan :

1) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan: kertas kop, amplop surat dll yang berlaku dan tepat waktuterealisasi 92,06%;

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan: laptop, komputer, printer dll dan jumlah perbaikan peralatan kerja yang berlaku dan tepat waktuterealisasi 97,46%;

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint dllteralisasi 93,92%;

4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahteralisasi 92,14%.

Kegiatan :

e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik terealisasi 97,21%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Penyediaan BBM Kepala Dinas Sosial selama 12 bulan dan jumlah service, penggantian suku cadang dan ganti oli mobil dinas, terealisasi 93,72%.

- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah Jumlah waktu Rehabilitasi Gedung kantor, terealisasi 98,85%.

- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah jumlah waktu Rehabilitasi Gedung Kantor, terealisasi 99,75%.

Kegiatan :

- f) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan IP ASN Perangkat Daerah, terealisasi 91,83%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator kinerja sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya adalah jumlah pengadaan Pakaian Dinas ASN dan Batik OPD, terealisasi 91,83%.

2.) Program Pemberdayaan Sosial

Pencapaian kinerja program pemberdayaan sosial adalah Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terealisasi 94,40%.

Kegiatan :

a) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi terealisasi 94,40%.

Sub. Kegiatan :

1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Jumlah PSM yang dibina terealisasi 95,12%;

2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Jumlah TKSK yang dibina, terealisasi 97,34%;

3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Jumlah KUBE Jasa dan e-warung yang diberdayakan, terealisasi 99,25%;

4) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Jumlah LKSA, Karang Taruna, Karang Werdha, Panti Werda yang diberdayakan dan yang menerima bantuan; dan Jumlah pelaksanaan Penyuluhan, terealisasi 93,39%.

3.) Program Rehabilitasi Sosial

Pencapaian kinerja program rehabilitasi sosial adalah Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial terealisasi 93,21%.

Kegiatan:

- a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi terealisasi 94,53%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Penyediaan Alat Bantu

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu adalah Jumlah Pengemis dan Gelandangan yang menerima bantuan, Jumlah Penyandang Disabilitas yang menerima bantuan, terealisasi 97,74%.

- 2) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat adalah Jumlah pengemis dan gelandangan yang diberdayakan, terealisasi 94,53%;

- 3) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga adalah Jumlah orang terlantar yang dipulangkan, terealisasi 87,95%.

Kegiatan:

- b) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi terealisasi 94,53%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Penyediaan Permakanan
Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Permakanan adalah Jumlah Eks penderita kusta yang difasilitasi, terealisasi 95,67%;
- 2) Penyediaan Alat Bantu
Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu adalah Jumlah PPKS (PSK, Anak Jalanan, Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Anak yang mengikuti tetirah, Pemulung, WRSE, Fakir Miskin , ODGJ) yang menerima bantuan, terealisasi 78,14%;
- 3) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA adalah Jumlah PPKS (PSK, Anak Jalanan, Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Pencegahan Tindak Kekerasan Human Trafficking, Penanganan Balita, Anak Terlantar dan Adopsi, Pemulung, WRSE, Fakir Miskin, ODGJ) peserta pemberdayaan yang menerima bimbingan ketrampilan, terealisasi 95,27%;

- 4) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
Indikator kinerja sub kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota adalah Jumlah pelaksanaan razia tim reaksi cepat PPKS, Jumlah peserta sosialisasi anak yang berhadapan dengan hukum, Jumlah anak yang mengikuti tetirah, terealisasi 99,41%.

4.) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pencapaian kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terealisasi 95,34%.

Kegiatan :

- a) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah data fakir miskin yang dikelola terealisasi 5,03%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah Jumlah petugas pendampingan dan operator PKH, terealisasi 94,48%;

- 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah Tersedianya data verivali dan data PMKS-PSKS, terealisasi 98,40%;

- 3) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan pencapaian indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota terealisasi 95,28%.

5.) Program Penanganan Bencana

Pencapaian kinerja Program Penanganan Bencana adalah Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial terealisasi 83,67%.

Kegiatan :

- a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota terealisasi 73,16%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Penyediaan Makanan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Makanan adalah Jumlah waktu tersedianya stock logistic korban bencana alam dan sosial, terealisasi 64,30%;

- 2) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi adalah Jumlah waktu pelaksanaan tindakan operasional tanggap darurat bencana alam dan sosial, terealisasi 90,88%.

Kegiatan :

- b) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Tagana yang dibina terealisasi 94,17%.

Sub. Kegiatan :

- 1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana adalah Jumlah Tagana yang dibina, terealisasi 94,17%.

Tabel E.81 Pada Aplikasi AKSARA

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2022) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2022 (%)	
				5		6		7		8		9		10		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemer		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah														

Integritas dan Profesionalitas Integritas Profesional dan Akuntabel	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,95	54,597,816,800	-	-	90	NUL L	20	2,459,001,516	90	100.00 %	6,231,904,373	-	90	6,231,904,373		
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	90	400,000,000	90	-	90	NUL L	20	<u>1,535,750</u>	90	100.00 %	14,675,750	-	0	14,675,750		
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1 Jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	13	200,000,000	5	2000000	5	7,500,000	1	625,750	5	100.00 %	7,275,750	0.13%	0	7,275,750		12.13%
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat	29	200,000,000	5	2000000	5	7,500,000	1	910,000	5	100.00 %	7,400,000	-	0	7,400,000	0	12.33 %

		waktu																
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.1 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90	37,086,137,600	80	-	80	NUL L	20	1,356,910,412	80	100.00 %	4,670,633,113	-	0	4,670,633,113	0	-%
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.1 Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	40	37,086,137,600	40	6184655680	14	5,627,108,000	5	1,356,910,412	14	35.00 %	4,670,633,113	71.30%	0	4,670,633,113	0	54.94 %
	3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.1 Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90	1,712,979,200	85	-	85	NUL L	20	62,616,006	85	100.00 %	188,637,962	-	0	188,637,962	0	-%
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	3.1 Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi	60	1,100,000,000	12	10000000	12	80,000,000	3	22,846,480	12	100.00 %	70,572,162	-	0	70,572,162	0	28.23 %

	Daya Air dan Listrik	sumber daya air dan listrik																
	2. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	3.1 Jumlah tenaga kerja pembantu administrasi keuangan selama 12 bulan	60	612,979,200	12	122595840	12	122,595,840	3	39,769,526	12	100.00 %	118,065,800	236.13 %	0	118,065,800	-	96.30 %
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.1 Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90	4,680,000,000	85	-	85	NUL L	30	<u>551,104,295</u>	85	100.00 %	729,653,295	-	0	729,653,295	-	-%
	1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.1 Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan: kertas kop, amplop surat dll yang berlaku dan tepat	20	435,000,000	4	55000000	12	57,000,000	3	29,226,104	12	300.00 %	52,476,104	-	0	52,476,104	-%	43.73 %

		waktu																
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.1 Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan: laptop, komputer, printer dll dan jumlah perbaikan peralatan kerja yang berlaku dan tepat waktu	60	2,030,000,000	10	270000000	12	485,000,000	3	401,097,582	12	120.00%	472,689,582	80.80%	0	472,689,582	- %	76.24 %
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.1 Jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint dll	60	435,000,000	12	55000000	12	100,000,000	3	63,325,000	12	100.00%	93,917,000	29.91%	0	93,917,000	- %	78.26 %

		4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.1 Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	1,360,000,000	12	15000000	12	120,000,000	3	57,455,609	12	100.00%	110,570,609	110.57%	0	110,570,609	- %	26.33 %
		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.1 Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	60	9,582,700,000	85	-	85	NUL L	25	447,163,053	85	100.00%	588,632,253	-	0	588,632,253	0.00 %	- %
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1 Penyediaan BBM Kepala Dinas Sosial dan jumlah service, penggantian suku cadang dan ganti oli mobil dinas	13	2,500,000,000	13	30000000	12	246,000,000	3	108,921,600	12	92.31%	230,554,000	66.29%	0	230,554,000	- %	32.94 %

		2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.1 Jumlah waktu Rehabilitasi Gedung kantor	54	850,000,000	8	10000000	12	60,000,000	3	39,475,700	12	150.00 %	59,312,500	5.77%	0	59,312,500	- %	65.90 %
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.1 Jumlah Waktu Rehabilitasi Gedung kantor	8	6,232,700,000	3	183000000	3	299,525,800	3	298,765,753	3	100.00 %	298,765,753	-	0	298,765,753	- %	38.40 %
		6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.1 Persentase Penyediaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	75	1,121,000,000	60	-	60	NUL L	60	<u>39,672,000</u>	60	100.00 %	39,672,000	-	0	39,672,000	0.00 %	- %

	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6.1 Jumlah Paket Pengadann Pakaian Dinas ASN dan Batik OPD	650	756,000,000	130	52000000	108	0	108	39,672,000	108	83.08%	39,672,000	-	0	39,672,000	- %	15.87 %
	2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.2 Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	50	9,661,103,843	-	-	80	NUL L	20	676,920,205	80	100.00%	1,736,915,737	-	80.00	1,736,915,737	- %	- %
	1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	1.1Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi	998	9,661,103,843	118	-	653	NUL L	412	676,920,205	653	553.39%	1,736,915,737	-	0	1,736,915,737	0.00 %	- %

	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.1 Jumlah PSM yang dibina	420	266,500,000	60	50000000	60	50,000,000	0	28,065,240	60	100.00%	47,560,490	475.60%	0	47,560,490	- %	79.27 %
	2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.1 Jumlah TKSK yang dibina	18	980,000,000	18	15000000	18	75,000,000	0	29,270,000	18	100.00%	73,006,750	-	0	73,006,750	- %	29.20 %
	3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.1 Jumlah KUBE Jasa dan e-warung yang diberdayakan	381	288,705,000	11	53250000	15	250,000,000	5	200,000,000	15	136.36%	248,136,750	165.42%	0	248,136,750	- %	330.85 %

		4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.1 Jumlah LKSA, Karang Taruna, Karang Werdha, Panti Werda yang diberdayakan dan yang menerima bantuan; dan Jumlah pelaksanaan Penyuluhan	179	8,125,898,843	29	14000000	560	1,465,000,000	412	419,584,965	560	1,931.03%	1,368,211,747	1,170.79%	0	1,368,211,747	- %	73.81 %
		3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.3 Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	40	59,720,621,340	-	-	60	NUL L	20	10,830,594,455	60	100.00%	11,273,085,765	-	60.00	11,273,085,765	- %	- %
		1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1.1Jumlah data fakir miskin yang dikelola	432,719	59,720,621,340	432719	-	79,367	NUL L	78,93	10,830,594,455	515,93	0.12%	11,273,085,765	-	0	11,273,085,765	0.00 %	- %

	1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1.1 Jumlah petugas pendampingan dan operator PKH	29,309	1,800,000,000	29309	35000000	133	300,000,000	0	90,813,750	133	0.45%	283,452,320	141.73%	0	283,452,320	- %	75.59 %
	2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1.1 Tersedianya data verivali dan data PMKS-PSKS	324,48	1,800,000,000	324480	35000000	304	300,000,000	0	45,359,930	304	0.09%	295,212,670	-	0	295,212,670	- %	78.72 %
	3. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.1 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	78,93	56,120,621,340	78930	11224124268	78,93	11,224,124,268	78,93	10,694,420,775	78,93	0.10%	10,694,420,775	-	0	10,694,420,775	- %	95.28 %

	4. PROGRAM PENANGANA N BENCANA	1.4 Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	40	1,925,000,000	-	-	60	NUL L	15	164,288,635	60	100.00 %	250,997,461	-	60.00	250,997,461	- %	- %
	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	1.1 Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	1,905	1,200,000,000	381	-	12	NUL L	3	<u>62,839,185</u>	12	3.15 %	109,740,835	-	0	109,740,835	0.00 %	- %
	1. Penyediaan Makanan	1.1 Jumlah waktu tersedianya stock logistic korban bencana alam dan sosial	1,855	725,000,000	371	12500000	12	100,000,000	3	48,026,185	12	3.23 %	64,300,835	-	0	64,300,835	- %	36.74 %
	2. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1.1 Jumlah waktu pelaksanaan tindakan operasional tanggap	50	475,000,000	10	7500000	12	50,000,000	3	14,813,000	12	120.00 %	45,440,000	-	0	45,440,000	- %	36.35 %

		darurat bencana alam dan sosial																
	2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	2.1 Jumlah Tagana yang dibina	250	725,000,000	50	-	44	NUL L	44	101,449,450	44	88.00 %	141,256,626	-	0	141,256,626	0.00 %	- %
	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	2.1 Jumlah Tagana yang dibina	250	725,000,000	50	125000000	44	50,000,000	44	101,449,450	44	88.00 %	141,256,626	141.26 %	0	141,256,626	- %	80.72 %
	5. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.5 Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	50	5,132,238,544	-	-	60	NUL L	15	165,889,930	60	100.00 %	615,103,662	-	60.00	615,103,662	- %	- %

		1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	611	1,882,238,544	105	-	48	NUL L	30	<u>64,816,330</u>	48	45. 71 %	116,476,134	-	0	116,476,134	0.00 %	- %
		1. Penyediaan Alat Bantu	1.1 Jumlah Pengemis dan Gelandangan yang menerima bantuan, Jumlah Penyandang Disabilitas yang menerima bantuan	176	950,000,000	33	15000000	27	50,000,000	27	48,871,080	27	81. 82 %	48,871,080	-	0	48,871,080	- %	19.55 %

		2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.1 Jumlah Pengemis dan Gelandangan yang diberdayakan	80	400,000,000	10	50000000	9	25,000,000	0	5,521,500	9	90.00%	23,631,340	10.74%	0	23,631,304	- %	23.63 %
		3. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.1 Jumlah orang terlantar yang dipulangkan	295	350,000,000	50	50000000	12	50,000,000	3	10,423,750	12	24.00%	43,973,750	58.63%	0	43,973,750	- %	43.97 %
		2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	2.1 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban	1,188	3,250,000,000	368	-	527	NUL L	38	101,073,600	338	91.85%	498,627,528	-	0	498,627,528	0.00 %	- %

Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi																	
1. Penyediaan Permakanan	2.1 Jumlah Eks penderita kusta yang difasilitasi	186	1,000,000,000	186	15000000	186	150,000,000	0	0	186	100.00 %	143,500,660	-	0	143,500,660	- %	57.40 %	
2. Penyediaan Alat Bantu	2.1 Jumlah PPKS (PSK, Anak Jalanan, Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Anak yang mengikuti tetirah, Pemulung, WRSE, Fakir Miskin , ODGJ) yang menerima bantuan	190	850,000,000	30	15000000	20	100,000,000	2	0	20	66.67 %	78,140,448	-	0	78,140,448	- %	39.07 %	

			2.1 Jumlah PPKS (PSK, Anak Jalanan, Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Pencegahan Tindak Kekerasan Human Trafficking, Penanganan Balita, Anak Terlantar dan Adopsi, Pemulung, WRSE, Fakir Miskin, ODGJ) peserta pemberdayaan yang menerima bimbingan ketrampilan	800	800,000,000	150	15000000	170	150,000,000	0	53,974,000	170	113.33%	142,902,460	-	0	142,902,460	-%	81.66%
3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																			

		4. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	2.1 Jumlah pelaksanaan razia tim reaksi cepat PPKS, Jumlah peserta sosialisasi anak yang berhadapan dengan hukum, Jumlah anak yang mengikuti tetirah	12	600,000,000	2	10000000	151	134,880,832	0	47,099,600	151	7,550.00%	134,083,960	-	0	134,083,960	- %	89.39 %
Rata - rata capaian kinerja (%) :																			

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana tabel 2.2. (Tabel T-C. 29 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagai berikut :

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL DAN
PENCAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL S/D TAHUN 2022
KABUPATEN MOJOKERTO**

Nama OPD : DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output) Sub. Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan/Sub. Kegiatan s/d tahun (n.3) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program /Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun Lalu (n.2)			Target Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan (Renja SKPD Tahun n.1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2022)	
					Target Renja SKPD Tahun (n.2) Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun (n.2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n.1) Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10 / 4)
0601	Urusan Sosial Bidang Urusan Sosial PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,35		80,34	80,34	100%	80,35	80,35	100%

06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	90%	85%	87,14%	87,14%	100%	90%	90%	90%
06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%
06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	60%	NA	60%	60%	100%	60%	60%	60%
06	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas ASN dan batik OPD	1 Paket	0	0	0	0%	0	0	0%
06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-	40 Orang	0	0	0	0%	0	0	0%

					undangan								
06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	80%	80%	70,35%	70,35%	100%	80%	80%	100%
06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100%	14 Bulan	14 Bulan	100%
06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	85%	85%	85%	85%	100%	85%	85%	100%
06	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan: laptop, komputer, printer dll dan jumlah perbaikan peralatan kerja yang berlaku dan tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

0 6	0 1	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan: kertas kop, amplop surat dll yang berlaku dan tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
0 6	0 1	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint dll	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
0 6	0 1	2.0 6	07	Penyediaan Bahan/Material	Jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint dll	12 Bulan	0	0	0	0%	0	0	0%
0 6	0 1	2.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu penyediaan mamim rapat dan tamu	12 Bulan	0	0	0	0%	0	0	0%
0 6	0 1	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	85%	85%	71,60%	71,60%	100%	85%	85%	100%
06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
06	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pembantu administrasi keuangan selama 12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	85%	85%	63,73%	63,73%	100%	85%	85%	100%
06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan BBM Kepala Dinas Sosial dan jumlah service, penggantian suku cadang dan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ganti oli mobil dinas Jumlah waktu Rehabilitasi Gedung kantor	12 Bulan	0	0	0	0%	0	0	0%
06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu Rehabilitasi Gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	NA	85%	85%	100%	100%	100%	100%

06	02	2.0 3		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi	60 PSM, 18 TKSK, 11 KUBE, 6 LKSA, 60 Orang pengurus LKSA, 50 Orang klien PW	60 PSM, 18 TKSK, 11 KUBE, 6 LKSA, 60 Orang pengurus LKSA, 50 Orang klien PW	60 PSM, 18 TKSK, 11 KUBE, 6 LKSA, 60 Orang pengurus LKSA, 50 Orang klien PW	60 PSM, 18 TKSK, 11 KUBE, 6 LKSA, 60 Orang pengurus LKSA, 50 Orang klien PW	100%	60 PSM, 18 TKSK, 11 KUBE, 6 LKSA, 60 Orang pengurus LKSA, 50 Orang klien PW	60 PSM, 18 TKSK, 11 KUBE, 6 LKSA, 60 Orang pengurus LKSA, 50 Orang klien PW	100%
06	02	2.0 3	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang dibina	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	60 Orang	60 Orang	100%
06	02	2.0 3	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang dibina	18 Orang	18 Orang	18 Orang	18 Orang	100%	18 Orang	18 Orang	100%
06	02	2.0 3	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KUBE Jasa dan e- warung yang diberdayakan	11 KUBE	11 KUBE	11 KUBE	11 KUBE	100%	11 KUBE	11 KUBE	100%

06	02	2.0 3	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LKSA, Karang Taruna, Karang Werdha, Panti Werda yang diberdayakan dan yang menerima bantuan; dan Jumlah pelaksanaan Penyuluhan	6 LKSA, 60 Orang pengurus LKSA, 50 Oang klien PW	6 LKSA, 60 Orang pengurus LKSA, 50 Oang klien PW	6 LKSA, 60 Orang pengurus LKSA, 50 Oang klien PW	6 LKSA, 60 Orang pengurus LKSA, 50 Oang klien PW	100%	6 LKSA, 60 Orang pengurus LKSA, 50 Oang klien PW	6 LKSA, 60 Orang pengurus LKSA, 50 Oang klien PW	100%
06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	100%	NA	85%	85%	100%	100%	100%	100%
06	04	2.0 1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	9 Gepeng, 14 Disabilitas, 12 Bulan	9 Gepeng, 14 Disabilitas, 12 Bulan	9 Gepeng, 14 Disabilitas, 12 Bulan	9 Gepeng, 14 Disabilitas, 12 Bulan	100%	9 Gepeng, 14 Disabilitas, 12 Bulan	9 Gepeng, 14 Disabilitas, 12 Bulan	100%

06	04	2.0 1	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Pengemis dan Gelandangan yang menerima bantuan, Jumlah Penyandang Disabilitas yang menerima bantuan	9 Orang Gepeng, 14 Orang Disabilitas	9 Orang Gepeng, 14 Orang Disabilitas	9 Orang Gepeng, 14 Orang Disabilitas	9 Orang Gepeng, 14 Orang Disabilitas	100%	9 Orang Gepeng, 14 Orang Disabilitas	9 Orang Gepeng, 14 Orang Disabilitas	100%
06	04	2.0 1	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah layanan reunifikasi keluarga	12 Bulan	0	0	0	0%	0	0	0%
06	04	2.0 1	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Pengemis dan Gelandangan yang diberdayakan	9 Orang Gepeng	9 Orang Gepeng	9 Orang Gepeng	9 Orang Gepeng	100%	9 Orang Gepeng	9 Orang Gepeng	100%

06	04	2.0 1	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
06	04	2.0 2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	186 KK, 20 Orang PSK, 14 Orang Disabilitas, 150 peserta adopsi, 1 kali razia, 150 peserta ABH	186 KK, 20 Orang PSK, 14 Orang Disabilitas, 150 peserta adopsi, 1 kali razia, 150 peserta ABH	186 KK, 20 Orang PSK, 14 Orang Disabilitas, 150 peserta adopsi, 1 kali razia, 150 peserta ABH	186 KK, 20 Orang PSK, 14 Orang Disabilitas, 150 peserta adopsi, 1 kali razia, 150 peserta ABH	100%	186 KK, 20 Orang PSK, 14 Orang Disabilitas, 150 peserta adopsi, 1 kali razia, 150 peserta ABH	186 KK, 20 Orang PSK, 14 Orang Disabilitas, 150 peserta adopsi, 1 kali razia, 150 peserta ABH	100%
06	04	2.0 2	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Eks penderita kusta yang difasilitasi	186 KK	186 KK	186 KK	186 KK	100%	186 KK	186 KK	100%

06	04	2.0 2	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PPKS (PSK, Anak Jalanan, Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Anak yang mengikuti tetirah, Pemulung, WRSE, Fakir Miskin, ODGJ) yang menerima bantuan	20 Orang PSK	20 Orang PSK	20 Orang PSK	20 Orang PSK	100%	20 Orang PSK	20 Orang PSK	100%
06	04	2.0 2	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah PPKS (PSK, Anak Jalanan, Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Pencegahan Tindak Kekerasan Human Trafficking, Penanganan Balita, Anak Terlantar dan	14 Orang Disabilitas, 20 Orang PSK, 150 peserta adopsi	14 Orang Disabilitas, 20 Orang PSK, 150 peserta adopsi	14 Orang Disabilitas, 20 Orang PSK, 150 peserta adopsi	14 Orang Disabilitas, 20 Orang PSK, 150 peserta adopsi	100%	14 Orang Disabilitas, 20 Orang PSK, 150 peserta adopsi	14 Orang Disabilitas, 20 Orang PSK, 150 peserta adopsi	100%

					Adopsi, Pemulung, WRSE, Fakir Miskin, ODGJ) peserta pemberdayaan yang menerima bimbingan ketrampilan								
06	04	2.0 2	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan razia tim reaksi cepat PPKS, Jumlah peserta sosialisasi anak yang berhadapan dengan hukum, Jumlah anak yang mengikuti tetirah	1 Kali razia, 150 peserta ABH	1 Kali razia, 150 peserta ABH	1 Kali razia, 150 peserta ABH	1 Kali razia, 150 peserta ABH	100%	1 Kali razia, 150 peserta ABH	1 Kali razia, 150 peserta ABH	100%
0 6	0 5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	NA	85%	85%	100%	100%	100%	100%

06	05	2.0 2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dikelola	19 Orang,114 Orang, 304 Desa,18Kecamatan, '78.930 Keluarga	19 Orang,114 Orang, 304 Desa,18Kecamatan, '78.930 Keluarga	19 Orang,114 Orang, 304 Desa,18Kecamatan, '78.930 Keluarga	19 Orang,114 Orang, 304 Desa,18Kecamatan, '78.930 Keluarga	100%	19 Orang,114 Orang, 304 Desa,18Kecamatan, '78.930 Keluarga	19 Orang,114 Orang, 304 Desa,18Kecamatan, '78.930 Keluarga	100%
06	05	2.0 2	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah petugas pendampingan dan operator PKH	19 Orang,114 Orang	19 Orang,114 Orang	19 Orang,114 Orang	19 Orang,114 Orang	100%	19 Orang,114 Orang	19 Orang,114 Orang	100%
06	05	2.0 2	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data verivali dan data PMKS-PSKS	304 Desa18Kecamatan	304 Desa18Kecamatan	304 Desa18Kecamatan	304 Desa18Kecamatan	100%	304 Desa18Kecamatan	304 Desa18Kecamatan	100%
06	05	2.0 2	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan	78.930 Keluarga	78.930 Keluarga	78.930 Keluarga	78.930 Keluarga	100%	78.930 Keluarga	78.930 Keluarga	100%

					kabupaten/kota								
06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah waktu tersedianya stock logistic korban bencana alam dan sosial	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah waktu pelaksanaan tindakan operasional tanggap darurat bencana alam dan sosial	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

06	06	2.0 2		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tagana yang dibina	44 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	44 Orang	44 Orang	100%
06	06	2.0 2	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana yang dibina	44 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	44 Orang	44 Orang	100%

1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara garis besar dari 1 (satu) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk Tahun 2022 seluruhnya telah dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.2.

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Dinas Sosial

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Sistem Perlindungan Sosial dalam Penanganan PPKS	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penurunan Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)
			Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
			1. Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
			2. Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			3. Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial
4. Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial			

No	Sasaran	Pencapaian	
		Tercapai	Tidak Tercapai
1.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	√	

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan/kegagalan dan pencapaian sasaran adalah:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	80%	80%	100%
Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	60%	60%	100%
Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	60%	60%	100%
Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	60%	60%	100%
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik	Baik	100%
Hasil Capaian Kinerja			100%

Hasil capaian kinerja sasaran ***Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)*** melalui Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial dan Program Penanganan Bencana pada hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%. Dari indikator *output* diatas, hasil (*outcome*) yang diharapkan adalah terwujudnya penurunan PPKS penerima manfaat kesejahteraan sosial.

Capaian Kinerja di tinjau dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Meliputi:

No	Indikator	Capaian Kinerja (Formulasi)
1.	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	<p>Jumlah PSKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial</p> $\frac{\text{Jumlah PSKS yang seharusnya menerima manfaat program pemberdayaan sosial}}{\text{Jumlah PSKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial}} \times 100$
2	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	<p>Jumlah KPM penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> $\frac{\text{Jumlah KPM yang seharusnya menerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial}}{\text{Jumlah KPM penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial}} \times 100$
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungansosial	<p>Jumlah Tagana, korban bencana alam dan sosial penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> $\frac{\text{Jumlah Tagana, korban bencana alam dan sosial yang seharusnya menerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial}}{\text{Jumlah Tagana, korban bencana alam dan sosial penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial}} \times 100$

4	<p>Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial</p>	<p>Jumlah PPKS (Penerima Bimbingan Sosial dan alat bantu kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Kusta, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya, Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Anak yang mengikuti tetirah, Pemulung, WRSE, Fakir Miskin, ODGJ, Human Trafficking, Penanganan Balita, Anak Terlantar dan Adopsi, ABH, Orang Terlantar, dan Masyarakat di luar panti, serta pelaksanaan Razia TRC) penerima manfaat kesejahteraan social</p> <p style="text-align: center;">————— X 100</p> <p>Jumlah PPKS (Penerima Bimbingan Sosial dan alat bantu kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Kusta, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya, Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Anak yang mengikuti tetirah, Pemulung, WRSE, Fakir Miskin, ODGJ, Human Trafficking, Penanganan Balita, Anak Terlantar dan Adopsi, ABH, Orang Terlantar, dan Masyarakat di luar panti, serta pelaksanaan Razia TRC) yang seharusnya menerima manfaat kesejahteraan sosial</p>
---	---	--

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangkamenwujudkanperencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mewujudkanperencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sesuai dengan RenstraDinas Sosial Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.3. (Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)sebagaimana berikut dibawah ini :

TABEL 2.3
TC. 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA OPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN AKHIR
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	2023 (n=)	2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	2023 (n=)	2024 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%		NA	80%	75%	75%	NA	80%	75%	75%	
2.	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%		NA	60%	60%	55%	NA	60%	60%	55%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	100%		NA	60%	55%	50%	NA	60%	55%	50%	
4.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	100%		NA	60%	60%	50%	NA	60%	60%	50%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto merumuskan isu strategis yang penting dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Dari Masing-masing Sub Urusan

NO	ISU-ISU STRATEGIS	INOVASI	PERMASALAHAN DAN HAMBATAN
1	2	3	4
1	1. Semakin rentannya kondisi status sosial ekonomi masyarakat akibat perokomian global (Covid-19 dan kenaikan harga bahan pokok). 2. Penanganan PPKS. 3. Mengoptimalkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam penanganan PPKS.	1) SANG PATIH KESOS (Sarana Pengaduan dengan Pelayanan Hati dan Kasih Sayang dalam Penanganan Kesejahteraan Sosial). TRC (Tim Reaksi Cepat Penanganan PPKS).	- Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana dalam penanganan PPKS

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal PD

Berdasarkan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan rancangan Perangkat Daerah dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik).

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Selengkapnya sebagaimana tabel 2.3 (Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) berikut :

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKP								PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	HASIL ANALISI KEBUTUHAN							CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	LOKASI	INIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU INDIKATIF SETELAH REFOCUSING (Rp)	PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)		LOKASI	INIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	KEBUTUHAN DANA SETELAH REFOCUSING (Rp)	KEBUTUHAN DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Dinas Sosial	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80,35					Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Dinas Sosial	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80,35					
			Nilai RB Perangkat Daerah	65							Nilai RB Perangkat Daerah	65					
	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Dinas Sosial	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1					Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Dinas Sosial	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1					

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERH KABUPATEN/ KOTA	Dinas Sosial	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	90 %	6.222.703.840	6.222.703.840	6.222.703.840	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERH KABUPATEN/ KOTA	Dinas Sosial	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	90 %	6.222.703.840	6.222.703.840	7.255.429.640	1.032.725.800
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
	1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu		7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu		7.500.000	7.500.000	7.500.000	0
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen laporan		7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen laporan		7.500.000	7.500.000	7.500.000	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		5.627.108.000	5.627.108.000	5.627.108.000	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		5.627.108.000	5.627.108.000	5.627.108.000	0

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN		5.627.108.000	5.627.108.000	5.627.108.000	0	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN		5.627.108.000	5.627.108.000	5.627.108.000	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah		0	0	0	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah		0	0	43.200.000	43.200.000
1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah pengadaan pakaian dinas ASN dan batik OPD		0	0	0	0	1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah pengadaan pakaian dinas ASN dan batik OPD		0	0	43.200.000	43.200.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		212.000.000	212.000.000	212.000.000	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		212.000.000	212.000.000	762.000.000	550.000.000
1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan : laptop, komputer, printer dll dan jumlah perbaikan peralatan kerja yang berlaku dan tepat waktu		85.000.000	85.000.000	85.000.000	0	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan: laptop, komputer, printer dll dan jumlah perbaikan peralatan kerja yang berlaku dan tepat waktu		85.000.000	85.000.000	485.000.000	400.000.000

2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop surat dll yang berlaku dan tepat waktu	27.000.000	27.000.000	27.000.000	0	2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan: kertas kop, amplop surat dll yang berlaku dan tepat waktu	27.000.000	27.000.000	57.000.000	30.000.000
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis ATK yang disediakan : kertas, tinta, ballpoint dll	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint dll	40.000.000	40.000.000	100.000.000	60.000.000
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60.000.000	60.000.000	120.000.000	60.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	202.595.840	202.595.840	202.595.840	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	202.595.840	202.595.840	202.595.840	0	

1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		80.000.000	80.000.000	80.000.000	0
2.	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga kerja pembantu administrasi keuangan selama 12 bulan		122.595.840	122.595.840	122.595.840	0	2. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga kerja pembantu administrasi keuangan selama 12 bulan		122.595.840	122.595.840	122.595.840	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		166.000.000	166.000.000	166.000.000	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		166.000.000	166.000.000	605.525.800	439.525.800
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Penyediaan BBM Kepala Dinas Sosial dan jumlah service, penggantian suku cadang dan ganti oli mobil dinas		146.000.000	146.000.000	146.000.000	0	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Penyediaan BBM Kepala Dinas Sosial dan jumlah service, penggantian suku cadang dan ganti oli mobil dinas		146.000.000	146.000.000	246.000.000	100.000.000

	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah waktu Rehabilitasi Gedung kantor		0	0	0	0	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah waktu Rehabilitasi Gedung kantor		0	0	299.525.800	299.525.800
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah waktu Rehabilitasi Gedung kantor		20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah waktu Rehabilitasi Gedung kantor		20.000.000	20.000.000	60.000.000	40.000.000
2	PROGRAM PEMBERDAYAN SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		1.775.000.000	1.775.000.000	1.775.000.000	0	PROGRAM PEMBERDAYAN SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %		1.775.000.000	1.775.000.000	1.840.000.000	65.000.000	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi		1.775.000.000	1.775.000.000	1.775.000.000	0	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi			1.775.000.000	1.775.000.000	1.840.000.000	65.000.000	

1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang dibina	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang dibina	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang dibina	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0	2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang dibina	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0
3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KUBE Jasa dan e-warung yang diberdayakan	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0	3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KUBE Jasa dan e-warung yang diberdayakan	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0

	4.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah LKSA, Karang Taruna, Karang Werdha, Panti Werda yang diberdayakan dan yang menerima bantuan; dan Jumlah pelaksanaan Penyuluhan		1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	0	4.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah LKSA, Karang Taruna, Karang Werdha, Panti Werda yang diberdayakan dan yang menerima bantuan; dan Jumlah pelaksanaan Penyuluhan		1.400.000.000	1.400.000.000	1.465.000.000	65.000.000	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		8.794.200.295	8.794.200.295	8.794.200.295	0	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %		8.794.200.295	8.794.200.295	11.824.124.268	3.029.923.973		
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data fakir miskin yang dikelola		8.794.200.295	8.794.200.295	8.794.200.295	0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data fakir miskin yang dikelola			8.794.200.295	8.794.200.295	11.824.124.268	3.029.923.973		

1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah petugas pendampingan dan operator PKH		300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah petugas pendampingan dan operator PKH		300.000.000	300.000.000	300.000.000	0
2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota		Tersedianya data verivali dan data PMKS-PSKS		300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		Tersedianya data verivali dan data PMKS-PSKS		300.000.000	300.000.000	300.000.000	0
3.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota		8.194.200.295	8.194.200.295	8.194.200.295	0	3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota		8.194.200.295	8.194.200.295	11.224.124.268	3.029.923.973

4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial		250.000.000	250.000.000	250.000.000	0	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	100 %	250.000.000	250.000.000	300.000.000	50.000.000	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	
	1. Penyediaan Makanan		Jumlah waktu tersedia stock logistic korban bencana alam dan sosial		100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	1. Penyediaan Makanan		Jumlah waktu tersedia stock logistic korban bencana alam dan sosial		100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	

	2. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah waktu pelaksanaan tindakan operasional tanggap darurat bencana alam dan sosial		50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	2. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah waktu pelaksanaan tindakan operasional tanggap darurat bencana alam dan sosial		50.000.000	50.000.000	50.000.000	0
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Tagana yang dibina		100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Tagana yang dibina		100.000.000	100.000.000	150.000.000	50.000.000
	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Tagana yang dibina		100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Tagana yang dibina		100.000.000	100.000.000	150.000.000	50.000.000

5	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial		659.880.832	659.880.832	659.880.832	0	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	100 %	659.880.832	659.880.832	659.880.832	0
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi		125.000.000	125.000.000	125.000.000	0	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi		125.000.000	125.000.000	125.000.000	0
	1. Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Pengemis dan Gelandangan yang menerima bantuan, Jumlah Penyandang Disabilitas yang menerima bantuan		50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	1. Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Pengemis dan Gelandangan yang menerima bantuan, Jumlah Penyandang Disabilitas yang menerima bantuan		50.000.000	50.000.000	50.000.000	0

	2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Pengemis dan Gelandangan yang diberdayakan		25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Pengemis dan Gelandangan yang diberdayakan		25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	
	3. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah orang terlantar yang dipulangkan		50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	3. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah orang terlantar yang dipulangkan		50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	

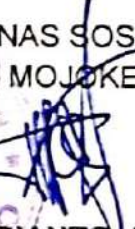
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi		534.880.832	534.880.832	534.880.832	0	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi		534.880.832	534.880.832	534.880.832	0
1.	Penyediaan Permakanan		Jumlah Eks penderitakusta yang difasilitasi		150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	1. Penyediaan Permakanan		Jumlah Eks penderitakusta yang difasilitasi		150.000.000	150.000.000	150.000.000	0
2.	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah PPKS (PSK, Anak Jalanan, Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Anak yang mengikuti tetirah, Pemulung, WRSE, Fakir Miskin, ODGJ) yang menerima bantuan		100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	2. Penyediaan Alat Bantu		Jumlah PPKS (PSK, Anak Jalanan, Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Anak yang mengikuti tetirah, Pemulung, WRSE, Fakir Miskin, ODGJ) yang menerima bantuan		100.000.000	100.000.000	100.000.000	0

3.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Jumlah PPKS (PSK, Anak Jalanan, Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Pencegahan Tindak Kekerasan Human Trafficking, Penanganan Balita, Anak Terlantar dan Adopsi, Pemulung, WRSE, Fakir Miskin, ODGJ) peserta pemberdayaan yang menerima bimbingan ketrampilan		150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	3. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah PPKS (PSK, Anak Jalanan, Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Pencegahan Tindak Kekerasan Human Trafficking, Penanganan Balita, Anak Terlantar dan Adopsi, Pemulung, WRSE, Fakir Miskin, ODGJ) peserta pemberdayaan yang menerima bimbingan ketrampilan		150.000.000	150.000.000	150.000.000	0
4.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan razia tim reaksi cepat PPKS, Jumlah peserta sosialisasi anak yang berhadapan dengan hukum, Jumlah anak yang mengikuti tetirah		134.880.832	134.880.832	134.880.832	0	4. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan razia tim reaksi cepat PPKS, Jumlah peserta sosialisasi anak yang berhadapan dengan hukum, Jumlah anak yang mengikuti tetirah		134.880.832	134.880.832	134.880.832	0

					17.701.784.967	17.701.784.967	17.701.784.967	0						17.701.784.967	17.701.784.967	21.879.434.740	4.177.649.773
--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	---	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	---------------

Mojokerto, 2 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO


TRY RAHARJO MURDIANTO, S.STP., M.AP.
NIP. 19870519 200602 1 002

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat tiga pemangku kepentingan yang saling mendukung, yaitu Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya.

Selanjutnya dari hasil penelitian dan usulan tersebut diverifikasi terlebih dahulu bersama dengan Bappeda Kabupaten Mojokerto, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dan pihak pemangku kepentingan, antara lain :

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes;
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan;
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu -isu penting dari masing-masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Berikut ini usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 :

(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

TABEL 2.5
USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN ANGGARAN 2022
KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	PROGRAM / KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Program : Pemberdayaan</p> <p>Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</p>			200.000.000	Tidak bisa direalisasikan, dikarenakan tidak sesuai dengan Tusi Dinsos

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan aplikasi SIPD Kabupaten Mojokerto dengan pagu sementara yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Kabupaten Mojokerto sebesar **Rp.21.879.434.740,-**(Dua Puluh Satu Milyard Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat PuluhRupiah) adalah sebagaimana tabel berikut :

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN PAGU SEMENTARA SEBAGAIMANA PADA APLIKASI SIPD
KABUPATEN MOJOKERTO**

No	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan (Usulan Prioritas dan Cadangan)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2022 Dengan Pagu Sementara BAPPEDA							Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum Perubahan	Setelah Refokusing	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Sosial	80,35 %						
			Nilai RB Perangkat Daerah		65						
		Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Dinas Sosial	1						
1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	Dinas Sosial	90 %	6.222.703.840	6.222.703.840	7.255.429.640	1.032.725.800	PAPBD	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Dinas Sosial	90 %	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0		

		1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu		5 Dokumen	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0		
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan		5 Laporan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Dinas Sosial	80 %	5.627.108.000	5.627.108.000	5.627.108.000	0	PAPBD	
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40 Orang/Bulan	5.627.108.000	5.627.108.000	5.627.108.000	0		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Dinas Sosial	60 %	0	0	43.200.000	43.200.000	PAPBD	
		1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	0	0	43.200.000	43.200.000		
		Rincian :									
		Pembelian paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto	Jumlah ASN Dinas Sosial yang menerima pakaian dinas harian								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	Dinas Sosial	85 %	212.000.000	212.000.000	762.000.000	550.000.000	PAPBD	

		1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan: laptop, komputer, printer dll dan jumlah perbaikan peralatan kerja yang berlaku dan tepat waktu		12 Bulan	85.000.000	85.000.000	485.000.000	400.000.000		
		Rincian :									
		Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan								
		2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan: kertas kop, amplop surat dll yang berlaku dan tepat waktu		12 Bulan	27.000.000	27.000.000	57.000.000	30.000.000		
		Rincian :									
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan								
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint dll		12 Bulan	40.000.000	40.000.000	100.000.000	60.000.000		
		Rincian :									
		Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu atau rapat + ATK	Jumlah paket mamin rapat yang disediakan								

		4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 Bulan	60.000.000	60.000.000	120.000.000	60.000.000		
		Rincian :									
		Biaya perjalanan dinas pegawai selama 1 tahun	Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Dinas Sosial	85 %	202.595.840	202.595.840	202.595.840	0	PAPBD	
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		12 Bulan	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0		
		2. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pembantu administrasi keuangan selama 12 bulan		12 Bulan	122.595.840	122.595.840	122.595.840	0		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		85 %	166.000.000	166.000.000	605.525.800	439.525.800	PAPBD	

		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan BBM Kepala Dinas Sosial dan jumlah service, penggantian suku cadang dan ganti oli mobil dinas		12 Bulan	146.000.000	146.000.000	246.000.000	100.000.000		
		Rincian :									
		Pemeliharaan rutin dan kendaraan dinas atau operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara								
		2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah waktu Rehabilitasi Gedung kantor		12 Bulan	0	0	299.525.800	299.525.800		
		Rincian :									
		Biaya Perbaikan/ Rehabilitasi Gedung Dinas Sosial	Jumlah Gedung Dinas Sosial yang diperbaiki dengan baik								
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu Rehabilitasi Gedung kantor		12 Bulan	20.000.000	20.000.000	60.000.000	40.000.000		
		Rincian :									
		Biaya Pemeliharaan Berkala Sarana, Prasarana Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi								

2.		PROGRAM PEMBERDAYAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	100 %	1.775.000.000	1.775.000.000	1.840.000.000	65.000.000	PAPBD	
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi	Dinas Sosial	60 PSM, 18 TKSK, 11 KUBE, 6 LKSA, 60 Orang pengurus LKSA, 50 Orang klien PW	1.775.000.000	1.775.000.000	1.840.000.000	65.000.000	PAPBD	
		1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang dibina		60 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0		
		2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang dibina		18 Orang	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0		
		3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KUBE Jasa dan e- warung yang diberdayakan		11 KUBE	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0		
		4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LKSA, Karang Taruna, Karang Werdha, Panti Werda yang diberdayakan dan yang menerima bantuan; dan Jumlah pelaksanaan Penyuluhan		6 LKSA, 60 Orang pengurus LKSA, 50 Orang klien PW	1.400.000.000	1.400.000.000	1.465.000.000	65.000.000		

		Rincian :									
		Pembinaan Karang Taruna (Operasional Karang Taruna Kabupaten dan Bantuan Karang Taruna Desa)	Jumlah Karang Taruna yang Dibina								
3.		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	100 %	8.794.200.295	8.794.200.295	11.824.124.268	3.029.923.973	PAPBD	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dikelola		19 Orang, 14 Orang, 304 Desa, 18Kecamatan, '78.930 Keluarga	8.794.200.295	8.794.200.295	11.824.124.268	3.029.923.973	PAPBD	
		1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah petugas pendampingan dan operator PKH		19 Orang, 114 Orang	550.000.000	550.000.000	550.000.000	0		
		2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data verivali dan data PMKS-PSKS		304 Desa, 18Kecamatan	775.000.000	775.000.000	775.000.000	0		
		3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota		78.930 Keluarga	8.194.200.295	11.224.124.268	11.224.124.268	3.029.923.973		
		Rincian :									
		Dana DBHCHT	Penambahan upah buat pegawai								

4.		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	Dinas Sosial	100 %	250.000.000	250.000.000	300.000.000	50.000.000	PAPBD	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		12 Bulan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	PAPBD	
		1. Penyediaan Makanan	Jumlah waktu tersedianya stock logistic korban bencana alam dan sosial		12 Bulan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0		
		2. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah waktu pelaksanaan tindakan operasional tanggap darurat bencana alam dan sosial		12 Bulan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0		
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tagana yang dibina		44 Orang	100.000.000	100.000.000	150.000.000	50.000.000	PAPBD	
		1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana yang dibina		44 Orang	100.000.000	100.000.000	150.000.000	50.000.000		

		Rincian :									
		Pembinaan dan Pemanjapan Tagana dalam Kesiap Siagaan Bencana (Pelatihan Peningkatan Kapasitas Dalam Tenggap Darurat Bencana)	Jumlah Tagana Kabupaten Mojokerto yang Mengikuti Pembinaan								
5.		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	100 %	659.880.832	659.880.832	659.880.832	0	PAPBD	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi		9 Gepeng, 14 Disabilitas, 12 Bulan	125.000.000	125.000.000	125.000.000	0	PAPBD	
		1. Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Pengemis dan Gelandangan yang menerima bantuan, Jumlah Penyandang Disabilitas yang menerima bantuan		9 Orang Gepeng, 14 Orang Disabilitas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0		
		2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Pengemis dan Gelandangan yang diberdayakan		9 Orang Gepeng	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0		
		3. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan		12 Bulan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0		

		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi		186 KK, 20 Orang PSK, 14 Orang Disabilitas, 150 peserta adopsi, 1 kali razia, 150 peserta ABH	534.880.830	534.880.830	534.880.830	0	PAPBD	
		1. Penyediaan Permakanan	Jumlah Eks penderita kusta yang difasilitasi		186 KK	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0		
		2. Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PPKS (PSK, Anak Jalanan, Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Anak yang mengikuti tetirah, Pemulung, WRSE, Fakir Miskin, ODGJ) yang menerima bantuan		20 Orang PSK	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0		
		3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah PPKS (PSK, Anak Jalanan, Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Pencegahan Tindak Kekerasan Human Trafficking, Penanganan Balita, Anak Terlantar dan Adopsi, Pemulung, WRSE, Fakir Miskin, ODGJ) peserta pemberdayaan yang menerima bimbingan ketrampilan		14 Orang Disabilitas, 20 Orang PSK, 150 peserta adopsiadopsi	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0		

		4. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan razia tim reaksi cepat PPKS, Jumlah peserta sosialisasi anak yang berhadapan dengan hukum, Jumlah anak yang mengikuti tetirah		1 Kali razia, 150 peserta ABH	134.880.832	134.880.832	134.880.832	0		
JUMLAH TOTAL PAGU INDIKATIF :						17.701.784.967	12.817.071.520	21.879.434.740	4.177.649.773		

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini merupakan penjabaran / pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi yang diaplikasikan kedalam rencana kegiatan Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.

Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 :

- a. Mengingat harga kebutuhan mengalami kenaikan, maka dirasa perlu untuk penambahan anggaran;
- b. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat tentang penambahan (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) DBHCHT, sesuai dengan Data Proyeksi DBHCHT Tahun Anggaran 2022.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan membutuhkan perbaikan. Untuk itu kritik dan saran perbaikan sangat kami harapkan sehingga dimasa depan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto ini dapat memberikan manfaat bagi public atau masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah memberikan mandat kepada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat memberikan arahan untuk memudahkan pengukuran serta pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO



TRY RAHARJO MURDIANTO, S.STP., M.AP.
Pembina
NIP. 19870519 200602 1 002